

Merindui Sosok Pemimpin Bukan "Pejabat"

Hatta bukanlah orator ulung seperti Soekarno, tapi ia adalah salah satu konseptor terbaik yang pernah dimiliki oleh republik ini. Ia adalah seorang politikus, ekonom, dan orang yang cukup berdedikasi dan mencintai bangsanya. Sampai akhir hayatnya ia terus berupaya memperjuangkan rakyat Indonesia, terwujud dalam wasiat yang ia tulis: "... Saya ingin, dikubur ditempat Kuburan rakyat biasa, yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya", begitu tulis Hatta dalam surat wasiatnya (I Wangsa Widjaja, 1988: 96).

Hatta lahir dari pasangan Haji Muhammad Djamil (olama) dan Siti Saleha, di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Hatta digambarkan sebagai intelektual yang telah mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, dua tahun kemudian pindah ke ELS (Europese Langere School), lalu masuk MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), pendidikan dilanjutkan di Jakarta di PHS (Prins Hendrik School), 1919-1921. Hatta mulai terjun di dunia politik di usia 17 tahun (1917), bergabung dengan Jong Sumatranen Bond (HSB). Hatta melanjutkan sekolah ke Belanda, pada tahun 1932 meraih gelar sarjana ekonomi. Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda 1926 (Lih. Wawan Tunggal Alam, 2003: 3-13).

Banyak buku yang mengulas tentang sosok Hatta. Tulisan ini hanya kliping perjalanan Hatta untuk mengohari kerinduan kepada seorang pemimpin bangsa yang

benar-benar berdedikasi untuk rakyat dan bangsanya yang jarang ditemui saat ini. Hatta bukanlah pejabat yang memperkaya diri dari rakyat, hidup dengan kesederhanaan di tengah lika-liku dan prahara politik Indonesia.

Peletak Kebijakan Partai Politik Indonesia

Menarik dicatat adalah sikap Hatta yang menolak untuk menghidupkan PNI (Pendidikan) setelah ditandatangani maklumat No. X. Bagi Hatta, sebagai wakil presiden, ia harus berdiri di atas semua partai (Wawancara Dr. Muhammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni, 1978: 13).

Uniknya, tatkala menandatangani maklumat No X, Hatta menduduki posisi sebagai wakil presiden Indonesia. Indonesia kala itu memang memiliki model kepemimpinan yang unik dengan dwi-tunggal (1945), model kepemimpinan ini hanya dimiliki oleh negara Indonesia tidak negara lain. Hatta dan Soekarno sebagai dwi-tunggal



memiliki hak dan kekuasaan yang sama. Maka selaku wakil presiden Hatta juga memiliki kekuasaan untuk menandatangani maklumat no. X. Menurut Hatta Maklumat no. X adalah wujud dari ketidaksetujuan beberapa orang

dengan partai tunggal yang akan didirikan oleh Soekarno, sekaligus sebagai *image* bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

yang mengurus koperasi, yang kemudian memunculkan kepentingan golongan. hal ini baru muncul pada masa Orde Baru 1970-an. Koperasi sejatinya merupakan hal yang menjanjikan asalkan masih dalam prinsip kekeluargaan dan untuk kesejahteraan bersama. Sekarang, banyak koperasi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun belum banyak yang berkembang dengan mengembirakan. Belajar dari koperasi ala Hatta harangkali akan mengembalikan semangat semula dalam mengelola koperasi yang baik hingga dapat berkembang menjadi soko guru ekonomi di tengah pasar bebas.

Tinggalan Hatta yang lain adalah pemikiran tentang "Pancasila". Dewasa ini Pancasila sudah dianggap sebagai sesuatu yang telah usang "sekedar simbol". Sungguh miris untuk menghafal bunyi sila-silanya saja mungkin kita lupa, apalagi memaknainya. Pancasila adalah suatu yang unik yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Bagi Hatta sila-sila dalam Pancasila merupakan cita-cita masa datang dari realitas rakyat yang pait: Perikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara sedangkan "Perikemanusiaan" adalah dasar praktik hidupnya. Gambaran ini tidak jauh berbeda dengan pandangan konsep agama Islam, dan keyakinan dalam masyarakat Jawa "Mamunggal Kawala Gusti" tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan dengan manusia/masyarakat (Lih. I Wangsa Widjaja, 1988: 79).

"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" merupakan kelanjutan dalam praktik hidup dari cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dasar saling menghormati sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", adalah dasar untuk memimpin jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan (Lih. I Wangsa Widjaja, 1988: 79).

Persatuan Indonesia menegaskan Indonesia yang satu ditengah keberagaman "Bhinneka Tunggal Ika". Dasar Kerakyatan menciptakan pemerintah yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun demokrasi politik dan ekonomi. Dasar Keadilan Sosial adalah pedoman dan tujuan, agar rakyat dapat menciptakan

keadilan yang merata di semua aspek kehidupan (Lih. I Wangsa Widjaja, 1988: 80).

Pesan Hatta yang masih relevan kini, untuk kembali menemukan identitas "Indonesia": "Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti mengkhianati pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamlkan dengan perbuatan"...Camkalnlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati UUD 1945... (I Wangsa Widjaja, 1988: 80-81)

Ironis, Pancasila dan UUD 1945 yang telah dikonsepsi dan digagas sebagai fondasi negara Indonesia, tidak dipahami oleh hangasanya sendiri, bahkan sekadar hafal kelima silanya pun tidak dapat dilakukan oleh beberapa pengurus negara ini.

Banyak hal dalam diri Hatta yang telah ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Dedikasi dan kesungguhan Hatta untuk bangsa menjadikan kita merindui sosok pemimpin yang hilang kini.®

Rhoma Dwi Aria Yuliantri,
penggemar sejarah,
dosen Fakultas Ilmu Sejarah
Universitas Negeri Yogyakarta.

Foto-foto: (Repro: Mochtar Lubis,
Hati Nurani Melawan Kezaliman, 1986)

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold C. Brackman, *Indonesia: Continuation of History*, New York: Fredrick A. Praeger, 1962.
D.N. D.N. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madura (1948)-Peristiwa Sumatera (1955)*, Jakarta: Lajisan Pembaharuan, 1957.
Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta 2001.
I Wangsa Widjaja, *Mengenal Bung Hatta*, Jakarta: Gunung Agung, 1988.
Wawan Tunggal Alam, *Perencanaan Sukarno vs Hatta*, Jakarta: Gramedia, 2003.
A. Yani, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta: Gunung Agung, Bintang, Merah 1951, 1978.